



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RIKA SUSANTI**,
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **660331**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.525.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 184 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **890.000.000**

1. MOBIL, CR-V SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **698.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	750.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.863.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.863.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.